

## Spesial Issue

### ETNO CENTRIS KABINET DJOKOWI

**ALI BIN DACHLAN**

Rektor, Universitas Gunung Rinjani

**LALU NURUL YAQIN**

Direktur LPPM Universitas Gunung Rinjani

#### Prolog:

Dominasi kekuasaan etnis Jawa terus menabuh genderangnya dalam perhelatan politik Nasional. Kekuasaan tidak lagi berbicara mana yang mampu dan mempuni tetapi lebih kepada pembagian kursi kekuasaan berdasarkan keputusan politis yang etno sentris. Peradaban kebudayaan seperti itu telah menempatkan warga bangsa menjadi warga bangsa yang primitif, lacurnya lagi ke-primitifan itu menohok watak animalistik pada warganya. Hal itu terjadi, karena Politik kebudayaan etnis luar Jawa belum mampu membendung politik kebudayaan etnis Jawa, dimana wacana kebudayaan yang dibangun oleh mereka (etnis Jawa) berorientasi kekuasaan, sedangkan di luar etnis Jawa wacana yang dibangun hanya untuk suatu wacana saja.

Tulisan ini menyoroti peta etnik dalam kabinet Djokowi dengan mempertimbangkan asal usul partai yang diwakilinya atau asal profesi pejabat bersangkutan. Dari 34 menteri kabinet terdapat 14 orang menteri dari etnis Jawa jika Seketaris Kabinet disejajarkan dengan menteri, maka jumlah etnis Jawa sebanyak 16 orang, demikian pula Sekretaris Kabinet setingkat menteri, maka terdapat 17 menteri dari etnis Jawa, atau 50% dari jumlah menteri. Populasi etnis Jawa di Indonesia adalah 40,2 %. Dari Sumatera sebanyak 7 orang menteri terdiri dari etnis Minang (1) Batak (2), Aceh (2) Lampung (1), Sumatera Selatan (1) dan Edi Prabowo yang lahir di Sumatera, maka jumlah orang dari pulau Sumatera menjadi 8 orang. Dari pulau Sulawesi sebanyak tiga orang, dua dari Manado dan satu dari Bugis (Zainuddin Amali, Suharso Monoarfa dan Syahrul Yasin impo). Dari etnis Sunda, 1 orang, etnis Bali 1 orang, etnis Flores 1 orang, Maluku 1 orang, Jakarta (belum tentu orang Betawi) sebanyak 5 orang.

Beberapa etnis luar Jawa memang ada yang menjadi Menteri, tetapi mengapa etnis Sasak selalu dibelakang dan tidak pernah ada yang menjadi Menteri bahkan menjadi wakil Menteri sekalipun, sejak orde lama, orde baru hingga Reformasi dan yang terbaru tidak pernah dibicarakan dalam kabinet Djokowi. Mengapa? Pertanyaan ini dijawab dan dibincangkan dalam tulisan ini.

## PENDAHULUAN

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menyuruh keempat anggota parlemen dari partai Demokrat pulang ke negeri asalnya, gara gara anggota parlemen tersebut memberi kritik terhadap kebijakan presiden dalam menangani para pengungsi, pencari suaka diperbatasan Meksiko dan Amerika Serikat. Memang benar keempat anggota parlemen tersebut adalah imigran dari Afrika dan negara Arab Palestina. Keempatnya telah menjadi warga negara Amerika Serikat dan telah bermukim lebih dari dua puluh tahun lamanya. Presiden Trump dan sejumlah pengikutnya, tetap saja menganggap mereka sebagai pendatang dan kalau macam macam suruh saja mereka pulang ke negara asalnya. Pikiran ini termasuk kategori rasis. Dengan suara terbanyak kongres menyatakan sikap Donald Trump adalah rasisme.

Amerika pada dasarnya telah didirikan oleh kaum imigran dari Eropah, dengan terlebih dahulu menghalau dan membunuh pemilik benua itu orang orang Indian yang berkebudayaan tinggi. Dalam perjalanan sejarahnya, orang baru dari Eropah, juga mempekerjakan bangsa Afrika sebagai budak belian. Industri perbudakan di Amerika Serikat berkembang pesat untuk meningkatkan produksi barang hasil pertanian, peternakan, pertambangan, bukan saja sebagai pelanggaran hak asasi manusia secara masif dan sistimatis, tetapi juga sebagai eksploitasi manusia sebagai paktor produksi, yang telah melahirkan kelas majikan dan kelas budak. Hal itu terjadi sejak tahun 1607 dan sekarang?

Pada tahun 2019, Donald Trump membuat pernyataan rasis, setelah gelombang perubahan dunia dalam waktu ratusan tahun, dalam kurun waktu yang panjang. Artinya walaupun telah terjadi perubahan sepanjang sejarah, setiap kelompok manusia yang terhimpun dalam etnis tertentu, tidak dapat dipisahkan atau dihilangkan dari identitas etnik dan budayanya dengan tuntas, walaupun rezim yang berkuasa melakukan

berbagai doktrin atas nama ideologi bangsa, atas nama persatuan dan kesatuan, atas nama kepentingan yang lebih besar dari negara akan tetapi setiap orang akan tetap mengingat dan membanggakan akar budayanya, asal usulnya yang melahirkan gagasan untuk memberi bantuan dan pelayanan serta perlindungan kepada kelompok etnis atau tribalnya.

Di Canada, warga negaranya yang berbahasa dan berasal dari Prancis khususnya di negara bagian Quebec, telah dua kali melakukan referendum, untuk mendirikan pemerintahan sendiri, menjadi negara sendiri, tetapi masih kalah tipis. Demikian pula sub etnis Catalonia di Spanyol, terus menerus menuntut kemerdekaan dan ingin mendirikan negara sendiri. Hal ini terjadi justru dinegara negara maju dan makmur. Walaupun mereka kalah dalam setiap referendum, tetapi etnik itu akan tetap ada, bertahan dan bahkan berkembang, dan suatu saat akan menimbulkan ledakan yang merepotkan.

Orang orang Kurdi yang berada di wilayah segiempat Iran, Irak, Suriah, dan Turki, terus memperjuangkan hak hidupnya sebagai etnik yang memiliki akar budaya sendiri. Mereka dianiaya dan ditumpas oleh pemerintahan negara segi empat tersebut, tetapi mereka tetap bertahan dan tidak pernah akan menyerah sampai kapanpun. Demikian pula mengapa orang Inggris ingin keluar dari masyarakat Eropah?. Bukankah ekonominya lebih beruntung dalam sistim masyarakat Uni Eropah?. Rupanya kebanggaan etnik jauh lebih penting dari sekadar ekonomi, seperti juga nasib yang menimpa orang orang Kurdi tersebut diatas. Uni Soviet yang terdiri dari berbagai negara, tiba tiba runtuh setelah lebih dari 70 tahun lamanya dipelihara dengan ketat dan cermat. Seketika mereka kembali kepada jati diri bangsa dan etnik groupnya. Bahkan setelah runtuhnya Uni Soviet, negara negara bekas anggotanya juga terpecah belah berdasarkan etnik, agama dan budaya. Bosnia Herzekopina, Negara Cekoslowakia, menjadi negara Ceko dan negara Slawakia, Contoh contoh seperti itu sungguh banyak sekali di

dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Kasus yang menimpa etnis Rohingya dan etnis Mianmar lainnya, yang didasarkan pada pandangan agama dan budaya. Harus diwaspadai bahwa usulan pembentukan daerah otonomi baru di Indonesia, kemungkinan juga ada kaitannya dengan suku bangsa yang ada di Indonesia saat ini.

### **Indonesia Lebih Sulit.**

Apa yang akan menimpa Indonesia dimasa depan, jauh lebih sulit dan rumit jika dibandingkan dengan contoh negara yang dibutukan diatas. Hal ini terjadi karena bangsa Indonesia dibentuk diatas sejumlah suku bangsa yang sangat banyak dengan berbagai perbedaannya. Model pemerintahan jajahan Jepang 1942-1945, Indonesia dibagi menjadi dua wilayah yakni Wilayah Barat yang dikuasai oleh tentara dari Angkatan Darat dan Wilayah Timur dikuasai oleh Angkatan Laut. Hal ini berdasarkan ciri kepulauan dan keragaman etnis. Orang Belanda selama ratusan tahun telah memerintah Indonesia dengan menerapkan politik *divide et impera*. Orang Belanda dengan cermat mempelajari kebudayaan dari setiap suku bangsa di Indonesia. Hasil penelitian tersebut dijadikan dasar untuk menyusun pemerintahan setempat. Penjajah Belanda juga secara sistematis membawa misi agama Kristen, sebagai penasihat pemerintahan dari segi religi. Belanda juga mendorong penyebaran agama Kristen di Indonesia sebagai salah satu langkah kultural untuk mendekatkan pemerintahan jajahan dengan penduduk dengan agama baru yang dianutnya yang lebih dekat secara kultural dibanding dengan agama rakyat yang dianut penduduk asli.

Dewasa ini, cara mengukur kesetiaan etnis dalam mempertahankan keutuhan suatu negara jauh lebih rumit, memperbandingkan dengan contoh diatas. Pertama pemerintah mencoba dengan kalimat pemerataan pembangunan dengan membangun infrastruktur, dan satu harga yang sama untuk bahan bakar minyak. Model ini telah banyak dikritik oleh ahli ilmu

sosial dan kebudayaan. Anggota Uni Soviet mendapat senjata, minyak secara gratis, tapi akhirnya bubar. Segala potensi yang diberikan kepada Provinsi Timor Timur oleh pemerintah Indonesia, dalam sekejap lenyap ketika referendum dilakukan. Demikian pula, walaupun nama Irian diganti dengan Papua, membangun Papua dengan segala infrastrukturnya, sama sekali tidak mengubah pandangan sebagian besar masyarakatnya tentang kemungkinan mereka melepaskan diri dari ikatan negara kesatuan Indonesia.

Ada lagi cara yang dipergunakan oleh pemerintah, yakni dengan doktrin ideologi negara Pancasila. Dahulu ada lembaga yang disebut BP4 setingkat menteri. Sekarang pemerintah kembali membentuk lembaga yang hampir sama namanya BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang dipimpin oleh Megawati. Baik BP4 maupun lembaga BPIP sekarang telah menghabiskan anggaran negara yang besar, akan tetap saja hasilnya dipertanyakan Lembaga seperti itu masuk dalam katagori ideologi formal kenegaraan. Apakah doktrin ideologis formal mampu menghilangkan identitas etnik (Ideologi informal) dengan segala keberagamannya, memang tidak mudah untuk mendapatkan jawaban pasti. Bukankah ideologi adalah sebuah konsep pemikiran yang diabsraksikan dalam gagasan yang debatable?, seperti Marxisme, Leninisme dan slogan slogan komunis lainnya seperti sama rasa sama rata.? Sistem ideologi itu di Cina dan Vietnam sudah tidak ada isinya lagi, kecuali sistem satu partai untuk mengendalikan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Doktrin ideologi sudah tidak laku dan digantikan dengan ideologi kebebasan, seperti di Amerika dan negara Eropah lainnya. Pengalaman sejarah bangsa kita setelah 74 tahun merdeka membuktikan bahwa gagasan tersebut belum menyelesaikan masalah mendasar dalam kontek integrasi bangsa.

Satu cara lagi yang coba digagas pemerintah, yakni dengan memberikan porsi yang wajar

dan setara bagi etnis yang ada dalam menduduki jabatan penting dalam pemerintahan seperti jabatan menteri atau jabatan tinggi lainnya. Ketika presiden Jokowi mengumumkan nama-nama menteri, sejumlah orang dari Papua, menyampaikan pesan jelas, bahwa orang Papua belum ada wakilnya. Presiden dengan sigap segera memberikan wakil menteri dari orang Papua. Semula seorang menteri mengakui dirinya sebagai orang Papua, tetapi setelah ditelusuri, yang bersangkutan adalah etnis Maluku. Demikian pula sejumlah menteri yang lahir di Jakarta, pastilah mereka bukan orang Betawi, seperti Prabowo yang lahir di Jakarta, Suharso Monoarfa yang lahir di Mataram, pastilah bukan orang Sasak, dan lain-lainnya. Untuk itu, pemerintah menyadari bahwa etno sentris dapat menjawab kemungkinan perpecahan bangsa ini, juga disebabkan sentimen kesukuan dianggap dapat menipiskan integrasi bangsa, karena itulah pemerintah tampaknya akan menggunakan instrumen ini dalam penyusunan kabinet dari setiap presiden di Indonesia. Walaupun demikian, indikator tersebut akan sulit dibuktikan keberhasilannya.

### **Kabinet Sepanjang Sejarah Indonesia Merdeka**

Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17-8-1945, telah terjadi penyusunan kabinet sebanyak 40 kali, dan kita bagi dalam empat priode sebagai berikut. Priode Pertama sejak 17-8-1945 s/d 1959. Priode Kedua 1959-1966. Priode ketiga 1966-1998. Priode keempat adalah priode 1999-sekarang, atau juga zaman ini disebut era reformasi.

Dari 1945-1959 dibawah konstitusi hasil pemilihan umum 1955, masih mempertahankan negara Indonesia Serikat, terjadi penggantian kabinet sebanyak 20 kali. Sedangkan dari sejak dekrit 5 Juli 1959-1965, telah terjadi penggantian kabinet sebanyak 5 kali, sampai pemberontakan partai komunis Indonesia (PKI) yang

menyebabkan presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS yang dibuatnya sendiri setelah pidato pertanggung jawabannya yang berjudul Nawaaksara, ditolak oleh MPRS, sehingga ia kehilangan kepercayaan dari rakyat dan harus berhenti sebagai presiden. Yang menarik, adalah nama kabinet Soekarno sejak 1959 diberi julukan kabinet kerja 1,2,3,4 dan terakhir diberi nama kabinet Dwikora I dari 27 Agustus 1964-22 Pebruari 1966. Kabinet Dwikora II, dari 24 Pebruari 1966 s/d 28 Maret 1966. Kabinet Ampera I dari 25 Juli 1966 sampai 17 Oktober 1967. Kabinet Ampera II, adalah kabinet transisi setelah kekuasaan Soekarno dilucuti oleh MPRS.

Dalam pemerintahan Orde Baru (1966-1999) terjadi penggantian kabinet sebanyak 7 kali. Kabinet presiden Soeharto dijuluki Kabinet Pembangunan yang menteri-menterinya diambil dari kalangan ahli dari berbagai bidang keahlian, terutama dari kalangan akademisi terkemuka di Indonesia. Anggota kabinetnya disebut para teknokrat, pemikir dan konseptor pembangunan berkelanjutan. Kabinet presiden Soeharto adalah kabinet yang paling stabil dengan pertumbuhan ekonomi diatas 7%. Berbeda dengan kabinet presiden Soekarno, yang terlalu sering diganti, sehingga arah pembangunan tidak dirancang dengan baik. Dalam pemerintahan Soekarno, implasi diatas seratus persen. Soekarno bukan seorang presiden yang bekerja secara sistimatis, melainkan dia seorang politisi dan orator ulung yang menggagas ganyang Malaysia, anti nekolim dalam retorika, anti kapitalis dalam retorika, sehingga ekonomi Indonesia diambang kehancuran.

Dalam pemerintahan presiden Soekarno. Partai Komunis Indonesia berkembang sangat pesat dan beberapa tokohnya menduduki jabatan menteri dan wakil ketua DPRGR seperti Aidit, Nyoto, Nyono dan lain-lain. Pada zaman pemerintahan Soekarno tidak ada parlemen atau DPR, yang dipilih oleh rakyat. Memang ada DPR Gotong Royong yang dibuat Soekarno dan ada MPR

Sementara juga dibuat oleh presiden Soekarno. Pada saat bersamaan, presiden Soekarno juga membentuk berbagai lembaga yang bertujuan menyebarkan paham Soekarno seperti Front Nasional. Manipulasi politik presiden Soekarno adalah USDEK, yakni UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

### **Kabinet Jokowi 2019-2024.**

Presiden Jokowi, dalam menyusun kabinetnya menggunakan kata "berhati-hati". Kata itu mengandung arti bahwa dalam penyusunan anggota kabinet, mempertimbangkan berbagai aspek yang mencerminkan suatu kebijaksanaan yang memperhatikan kehendak partai pendukung dan mewakili berbagai profesi atau teknokrat yang sesuai dengan misi dan visi presiden. Presiden selalu merasa kesulitan dalam penyusunan anggota kabinet, khawatir para pendukungnya akan melakukan protes karena tidak mendapat kue jabatan tinggi tersebut, sementara itu presiden sangat menginginkan orang yang ditunjuk sebagai pembantunya adalah mereka yang mengerti sepenuhnya gaya dan visi presiden.

Presiden mungkin ingin memuaskan semua pihak, walaupun sulit agar semua pihak akan puas. Tulisan ini hanya menyoroti peta etnik dalam kabinet Jokowi dengan mempertimbangkan asal-usul partai yang diwakilinya atau asal profesi pejabat bersangkutan. Dari 34 menteri kabinet terdapat 14 orang menteri dari etnis Jawa jika Sekretaris Kabinet disejajarkan dengan menteri, maka jumlah etnis Jawa sebanyak 16 orang, demikian pula Sekretaris Kabinet setingkat menteri, maka terdapat 17 menteri dari etnis Jawa, atau 50% dari jumlah menteri. Populasi etnis Jawa di Indonesia adalah 40,2%. Dari Sumatera sebanyak 7 orang menteri terdiri dari etnis Minang (1), Batak (2), Aceh (2), Lampung (1), Sumatera Selatan (1), dan Edi Prabowo yang lahir di Sumatera, maka jumlah orang dari pulau Sumatera menjadi 8 orang. Dari pulau

Sulawesi sebanyak tiga orang, dua dari Manado dan satu dari Bugis (Zainuddin Amali, Suharso Monoarfa dan Syahrul Yasin Limpo). Dari etnis Sunda, 1 orang, etnis Bali 1 orang, etnis Plores 1 orang, Maluku 1 orang, Jakarta (belum tentu orang Betawi) sebanyak 5 orang.

Dari komposisi menteri Koordinator, sejumlah empat bidang dengan empat orang Menko. Menko Polhukam (Mahfud MD), dari etnis Madura, Menko Perekonomian (Erlangga Hartarto), etnis Jawa, Menko Kemaritiman (Luhut Binsar Panjaitan, etnis Batak dan Menko Bidang Pembangunan Manusia (Muhadjir Efendy), etnis Jawa.

Posisi wakil menteri, juga diberikan menurut asal etnis dan, profesi dan asal-usul partai. Misalnya wakil menteri Agama yang berasal dari PPP tetapi asal etnisnya Jawa, Wakil menteri pertahanan dari tim sukses Jokowi, berasal dari etnis Jawa, Wakil Menteri KLH, dari etnis Dayak, Wakil menteri PUPR dari etnis Papua, Wakil Menteri Desa, dari Jakarta (etnis?), Wakil menteri perdagangan, etnis Manado. Beberapa wakil menteri yang lahir di Jakarta belum tentu sebagai etnis Betawi, seperti Wakil menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, walaupun lahir di Jakarta, pastilah berasal dari Batak, demikian pula Juliari Batubara, lahir di Jakarta, tapi marga Batubara dari Sumut, atau menteri riset dan teknologi, Bambang Brojonegoro, pasti bukan orang Betawi tetapi lahir di Jakarta.

Pada kabinet IV, Presiden Soeharto, memang komposisi etnis Jawa, juga terlihat mendominasi jabatan menteri dan setingkat menteri. Bedanya adalah bahwa walaupun didominasi etnis Jawa masih kental, akan tetapi mereka tidak mewakili partai, melainkan penekanan pada keahlian masing-masing jabatan menteri tersebut. Karena itulah anggota kabinet presiden Soeharto sangat berbeda dengan kabinet Presiden Jokowi yang menekankan pada utusan dari partai pendukung, walaupun keahliannya masih bisa diperdebatkan, misalnya jabatan menko. Menteri di kabinet Soeharto disebut

sebagai para teknokrat dari kalangan para ahli.

Susunan kabinet Presiden SBY, hampir sama dengan kabinet Presiden Jokowi, dimana konfigurasinya mencerminkan pada jumlah perolehan kursi DPR sebagai hasil Pemilihan Umum Jumlah menteri dari partai PDIP jauh lebih besar dibandingkan partai lain, karena perolehan suaranya di DPR mencapai 120 anggota DPR. Demikian pula di zaman pemerintahan SBY, partainya memperoleh suara terbesar, maka jumlah menterinya juga terbesar, Partai dengan jumlah suara terkecil, seperti PPP, hanya mendapatkan 1 kursi menteri di tambah dengan 1 wakil menteri. Sementara PKB dan Nasdem yang memperoleh suara hampir sama, diberikan jatah 3 orang menteri. Anggota kabinet yang berasal dari partai, sangat tergantung kedekatan hubungan dengan ketua partai, bukan berdasarkan keahlian seperti pada zaman Kabinet IV Soeharto, misalnya Ketua PKB menunjuk saudaranya menjadi menteri kabinet Jokowi. Demikian pula dengan menteri menteri yang lain, sama sekali tidak berdasarkan keahlian tetapi berdasarkan kedekatan hubungan pribadi dengan pengurus partai.

Di zaman presiden Soeharto ada kabar, bahwa seorang menteri yang akan diangkat sebagai pembantu presiden, telah dipantau rekam jejaknya sejak beberapa tahun sebelumnya. Soeharto menguji calon menterinya dengan berbagai cara dan dalam waktu yang lama. Soeharto sangat berhati hati untuk menentukan calon menterinya dan menjauhkan diri dari mengangkat anak anaknya menduduki jabatan publik di pemerintahan. Barulah pada akhir masa jabatannya setelah tiga puluh tahun berkuasa, Soeharto menunjuk anaknya Siti Herdianti Rukmana memegang jabatan menteri sosial yang berangsur kurang setahun, karena adanya kerusuhan dan reformasi di Indonesia. Perbedaan utama kabinet Soeharto, karena tekanan partai tidak ada, dan Soeharto memiliki pandangan sendiri

dalam menentukan para pembantunya, tanpa intervensi dari kekuatan manapun., hal ini sesuai dengan semangat. Sistem kabinet presidensial menurut Undang Undang Dasar 1945.

Kabinet Hatta I dan Hatta II, lebih mencerminkan perwakilan etnis yang lebih beragam, walaupun etnis Jawa masih lebih banyak, tetapi tidak sebanyak seperti dalam kabinet Jokowi. Walaupun kabinet Hatta berlangsung tidak terlalu lama, yakni sampai Desember 1949, tetapi aspek keragaman etnis sudah dipertimbangkan dengan baik. Demikian pula pada kabinet Sahrir, kabinet Syafrudin, Kabinet Amir Sarifudin sampai kabinet Habibie. Kalau demikian apakah dapat disimpulkan, bahwa jika presidennya orang luar Jawa, atau jika menggunakan sistem parlementer dahulu, jika perdana menterinya orang luar Jawa, maka terdapat distribusi anggota kabinet berdasarkan etnis lebih mencerminkan keragaman etnis atau seperti apa yang sebenarnya. Sayang sekali sejarah Indonesia, mencatat hanya sekali saja orang dari luar Jawa pernah menjadi presiden, yakni Presiden B.J.Habibie. Itupun dalam keadaan memaksa, karena Habibie hanya menggantikan presiden Soeharto yang mengundurkan diri pada tahun 1998 (17 bulan), setelah itu diganti oleh Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi, yang semuanya dari etnis Jawa

### **Anggapan Yang Keliru.**

Jika kita membahas tentang etnis dalam jajaran pemerintah di Indonesia hanyalah sebuah daftar nama nama saja dan asal usul suku bangsanya. Tetapi fakta yang di tampilkan diatas, mencerminkan sebuah kenyataan yang masih hidup dalam masyarakat. Pernah hanya satu kali saja orang luar Jawa yang mencalonkan dirinya sebagai presiden, yakni B.J.Habibie, namun gagal. Memang benar, sukuisme adalah cerminan dari masyarakat kurang maju dan rendah penghayatan terhadap demokrasi. Di negara maju, masyarakat tidak menanyakan asal usul, agama dan suku bangsanya, tetapi

tentang gagasan dan pikirannya. Di Amerika terdapat 4 orang anggota kongres dari minoritas muslim, belum tentu semua orang muslim memilihnya dalam pemilihan umum. Demikian pula wali kota London yang muslim, dipilih bukan karena ia seorang muslim, melainkan karena ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Contoh yang baik adalah presiden Obama dari minoritas kulit hitam, terpilih menjadi presiden karena kemampuannya sebagai seorang presiden dari partai demokrat. Di Indonesia juga kelak jika sudah menjadi negara maju, masyarakatnya yang menentukan pilihannya, bukan etnisnya yang menyebabkan ia dipilih menjadi pemimpin. Dan Indonesia sampai sekarang belum tergolong masyarakat maju dari kultur demokrasi yang hakiki, selama masih menggenggam dasar etnis sebagai cara menentukan calon pemimpin. Jika para pemimpin negara ini sudah maju kebudayaannya, maka cara berfikir etno sentris akan lenyap seketika. Yang terjadi sekarang ini adalah para pemimpin kita sering menggunakan wacana etnis sebagai hal negatif yang bertentangan dengan bineka tunggal ika, tetapi pada dasarnya ungkapan tersebut hanyalah salah satu cara untuk membunuh karakter, agar mereka tetap mempertahankan etno sentrisnya yang melengket pada perilaku korup tersebut sehingga dia lebih mudah membangun koncoisme kolusi dan nepotisme.

### **Etnis Jawa *vis a vis* Etnis Luar Jawa**

Etnis jawa berjumlah 40,2 persen dari etnis luar jawa, dan secara kumulatif menjadi etnis paling besar. Sedangkan persentase etnis luar jawa berjumlah 59,8 persen tetapi bersifat parsial dan menyebar menjadi etnis-etnis kecil di masing-masing pulau yang dihuninya, itupun kalau bukan isinya orang Jawa yang sudah beranak pinak di pulau-pulau itu.

Apa yang membedakan etnis jawa dan luar jawa dalam kontestasi politik? Etnis Jawa mampu mengelola ketidaktahuannya menjadi pengetahuan yang menempatkan diri terus menjadi suku bangsa superior dan terus berkuasa, karena wacana kebudayaan yang dibangun oleh mereka berorientasi kekuasaan. Kesadarannya pada etnisitas dan kebudayaannya membuat mereka terus menerus menjadi bagian penting dalam perhelatan politik dan selalu tampil sebagai pemenang.

Dalam Bahasa lain politik kebudayaan mereka telah terbangun dan mafan, walaupun sesungguhnya sifat primitif ada pada peradaban mereka yang tak disadari, karena bagaimanapun etno sentris adalah karakter primitif paling mendasar yang tak disadari dan lacurnya cenderung menonjolkan watak animalistik.

Sementara itu, perhelatan politik Etnis luar jawa selalu memproduksi wacana yang tidak memiliki ujung kekuasaan, sehingga kadang menjadi pesakitan politik, dan para tokohnya menjadi tokoh “apabila” ‘apabila yang lain tidak ada, mereka diperlukan’. Itulah adigium yang sadar tidak sadar terbelalak didepan kita. Bahkan dalam alam bawah sadar kita mengakui, bahwa etnis Jawa selalu merasa merekalah yang berhak melahirkan pemimpin di Indonesia, sehingga tertanam dalam kognisi mereka Presiden selalu identik dengan orang Jawa. Dan kita juga tanpa sadar terus menerus meng-amini membenaran-pembenaran tersebut. Hal ini terbukti dalam basa basi sederhana orang Sasak, kalau mereka menikah dengan orang Jawa mereka menganggap “*perbaiki keturunan*”. Basa basi seperti ini tidak lahir dari medium kosong, ia ada menjadi fikiran karena kognisi politik kebudayaan jawa telah mempengaruhi alam sadar mereka.

Sebetulnya fikiran diatas sudah biasa bagi suku bangsa inferior yang tak pernah menyadari keterjajahan fikiran dan budaya. Maka tetap saja orang sasak memproduksi wacana. Ada makna lain yang dapat dirunut

apabila dikontekstualisasi dengan suku bangsa Sasak. Pada sisi lain, hampir semua orang Sasak mengetahui nenek moyang mereka pernah dijajah Karangasem Bali selama 150 tahun lebih. Namun pengetahuan tersebut tidak dapat menyadarkan orang Sasak dengan menjadikan keterjajahan mereka sebagai pintu masuk ke fase pencerahan. Mereka pendam pengetahuan keterjajahan tersebut tanpa melakukan kritik untuk melahirkan ketercerahan yang dapat menolong mereka mampu mengonstruksi keterjajahan sebagai arus balik peradaban. Lacurnya, bawah sadar pengetahuan keterjajahan tersebut berbuah sebaliknya, mereka semakin menjadi bangsa inferior bahkan mengekalkan watak keterjajahan ke dalam simbol-simbol budaya bangsa lemah.

### **Suku Bangsa Sasak, Dalam Lintasan Sejarah**

Menurut catatan BPS, pada 2010, di Indonesia terdapat sekurang kurangnya sebanyak 1340 suku bangsa dari yang jumlahnya besar dan kecil. Akan tetapi beberapa hal yang harus dikoreksi untuk menentukan apakah kelompok masyarakat tersebut masuk kategori suku bangsa atau sebuah komunitas baru sebagai bagian dari suku bangsa. Misalnya orang Lampung dewasa ini adalah kumpulan asal transmigran dari Jawa sejak jaman Belanda dahulu, ditambah lagi transmigran orang Bali dan orang dari Sunda yang secara sukarela menetap di Lampung. Saya kurang sependapat dengan kategori yang digunakan BPS. Orang Samin, orang Baduy adalah bagian dari suku bangsa Jawa atau dari suku bangsa Sunda yang disebut Sunda wiwitan. Orang Trunyan di Bali, tetaplh disebut orang Bali dari Trunyan atau bali aga.

Dari sejumlah suku bangsa yang ada di Indonesia, suku bangsa Sasak yang mendiami pulau Lombok, dahulu bernama Gumi Selaparang dan nama tuanya lagi adalah Gumi Selapawis, tergolong salah satu suku bangsa besar di Indonesia dengan populasi di pulau Lombok sendiri lebih dari 3.500.000,

atau sebesar 1,35% dari seluruh penduduk Indonesia. Orang Sasak juga mendiami banyak desa desa di Sumbawa bagian Barat sejak ratusan tahun silam. Jumlahnya semakin bertambah setelah program transmigrasi pemerintah, memindahkan orang Jawa, Bali dan Lombok ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sulawesi, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, Lampung, Sumbawa dan Sumbawa Barat. Jumlah mereka ratusan ribu dan tetap bertahan sebagai suku bangsa Sasak dengan segala identitas kesukuannya, seperti bahasa, adat istiadat, agama dan corak seni tradisional daerah asalnya serta sistem kemasyaakatannya.

Dalam hubungannya dengan etno sentris dalam susunan kabinet presiden Jokowi dan presiden Indonesia sebelumnya, kedudukan suku bangsa Sasak menjadi sangat menarik, Suku bangsa ini belum pernah diajak oleh pemerintahan siapapun juga di negeri ini, untuk dapat duduk sebagai anggota kabinet bahkan sampai menjadi wakil menteri sekalipun. Kemungkinan sebabnya adalah. Pertama suku bangsa ini tidak dikenal dengan baik oleh sejumlah politisi di Indonesia. Kedua, kemungkinannya adalah kekeliruan dalam menyusun nama suku bangsa yang mendiami suatu wilayah, misalnya suku bangsa Lampung, padahal asal usulnya sebagian besar dari Jawa dan berakulturasi dengan suku bangsa lain di wilayah itu. Jika NTB disebut suku bangsa NTB, bisa jadi yang dimaksudkan adalah suku bangsa Mbojo atau Samawa. Yang ketiga, bisa jadi suku bangsa Sasak memang kurang berminat, tidak mampu berminat, tidak ada jalan untuk menyalurkan minatnya agar dapat diikutkan sebagai anggota kabinet.

Kemungkinan ketiga inilah yang lebih mendekati alasan, mengapa suku bangsa Sasak tidak perlu hadir dalam kabinet sepanjang sejarah Indonesia merdeka dan mungkin sampai hari kiamat nanti. Dugaan inipun dapat dilihat pada pemilihan Gubernur NTB yang selama dua periode diberikan pada

suku bangsa Mbojo dan suku bangsa Sumbawa. Dalam hal ini, suku bangsa Sasak layak dijadikan sebagai contoh masyarakat maju, yang menyerahkan kepemimpinannya kepada siapa saja yang dianggap mampu tanpa mengedepankan asal usul etnisnya. Masyarakat Sasak adalah contoh suku bangsa yang menghargai perbedaan, sesuai dengan lakon sejarahnya yang penuh dengan perbedaan.

jawabannya, kita harus memiliki kesadaran politik kebudayaan yang paripurna.

### **Epilog:**

Menilik Sasak sebagai satu wacana atau budaya yang diproduksi Sasak sebagai wacana, apakah memiliki relevansi dengan situasi bawah sadar primitif Sasak? Tentu saja pertanyaan ini tak serta merta menempatkan Sasak dalam kehampaan atau berpotensi sebagai kecemerlangan. Karena boleh jadi, ketaksadaran tersebut ialah wacana mereka sendiri, yakni sebagai satu strategi pertarungan budaya untuk mendapatkan hak guna arena dalam kebudayaan yang lebih besar. Atau boleh jadi sebaliknya, ketaksadaran tersebut diciptakan orang lain untuk semakin menempatkan Sasak dalam ranah kuasa mereka. Dengan makna lain, jika benar ketaksadaran tersebut sebagai produk wacana orang lain, maka Sasak dilihat sebagai medan kekuasaan orang lain dengan sangat sengaja Sasak diciptakan sebagai bangsa inferior untuk selamanya.

Ulasan diatas menjadi cermin suku bangsa Sasak yang tidak pernah diperhitungkan sepanjang republik Indonesia ada. Jika orang berkulit hitam di Amerika bisa menjadi Presiden setelah 240 tahun dan orang Katolik memerlukan 170 tahun untuk jadi Presiden Amerika. Lalu berapa tahunkah masa menunggu orang luar Jawa agar bisa menjadi Presiden. Apakah perlu 240 tahun seperti orang kulit hitam di Amerika atau orang luar Jawa cukup menjadi presiden dalam republik mimpi saja?. Bagaimana dengan orang Sasak, kapan mereka bisa menjadi Menteri atau Presiden?. Mungkin salah satu